



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan disiplin, kinerja, motivasi dan kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 2

Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) PNS yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas, diberikan tambahan penghasilan 100% (seratus persen) jabatan definitif dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas.

Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda berdasarkan hasil proses penyetaraan jabatan yang memiliki tugas tambahan sebagai koordinator dan sub koordinator, diberikan tambahan penghasilan yang besarnya menyesuaikan dengan jabatan sebelumnya sampai ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.
- (2) PPPK diberikan tambahan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan jabatannya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pengangkatannya.

Bagian Kedua
Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Besaran tambahan penghasilan diberikan dengan pembulatan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan indikator pemberian tambahan penghasilan, kebijakan, dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan diberikan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. tempat kerja;
 - b. kelangkaan profesi;
 - c. beban kerja; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB III
EVALUASI**

Pasal 6

Besaran tambahan penghasilan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Besaran Nilai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Desember 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 65**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo SH.,MH
Nip197806052002121002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 65 TAHUN 2021, TANGGAL 14 DESEMBER 2021
 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

A. Besar tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Kerja

| No. | Tempat Kerja | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|-------------|
| 1 | Sanga-Sanga | 232.400 |
| 2 | Muara Jawa | 395.500 |
| 3 | Samboja | 333.900 |
| 4 | Muara Badak | 390.600 |
| 5 | Marang Kayu | 562.100 |
| 6 | Anggana | 237.300 |
| 7 | Tenggarong | - |
| 8 | Tenggarong Seberang | 197.400 |
| 9 | Loa Kulu | 208.600 |
| 10 | Loa Janan | 214.900 |
| 11 | Sebulu | 364.700 |
| 12 | Kota Bangun | 515.200 |
| 13 | Muara Kaman | 557.200 |
| 14 | Muara Wis | 664.300 |
| 15 | Muara Muntai | 729.400 |
| 16 | Kenohan | 842.800 |
| 17 | Kembang Janggut | 942.900 |
| 18 | Tabang | 1.000.000 |
| 19 | Jakarta | 1.000.000 |

B. Besar tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi dan Fungsional

1. Jabatan Ahli

| No. | Fungsional Ahli | Pertama | Muda | Madya | Utama |
|-----|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Dokter Spesialis | 10.345.050 | | | |
| 2 | Dokter Umum | 3.545.150 | 4.515.150 | 5.921.050 | 7.327.050 |
| 3 | Dokter Gigi | 3.545.150 | 4.515.150 | 5.921.050 | 7.327.050 |
| 4 | Apoteker | 3.173.950 | 4.027.550 | 4.827.150 | 5.951.950 |
| 5 | Epidemiolog Kesehatan | 3.034.250 | 3.432.950 | 3.815.150 | - |
| 6 | Entomolog Kesehatan | 3.034.250 | 3.432.950 | 3.815.150 | - |
| 7 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 3.034.250 | 3.432.950 | 3.815.150 | - |
| 8 | Sanitarian | 3.034.250 | 3.432.950 | 3.815.150 | - |
| 9 | Administrator Kesehatan | 3.034.250 | 3.432.950 | 3.815.150 | - |

| No. | Fungsional Ahli | Pertama | Muda | Madya | Utama |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | Nutrisionis | 3.034.250 | 3.432.950 | 3.815.150 | - |
| 11 | Perawat | 3.386.450 | 3.839.550 | 4.640.450 | - |
| 12 | Perawat Gigi | 3.386.450 | 3.839.550 | 4.640.450 | - |
| 13 | Bidan | 3.386.450 | 3.839.550 | 4.656.050 | - |
| 14 | Fisikawan Medis | 3.173.950 | 3.811.350 | 4.251.450 | - |
| 15 | Fisioterapis | 3.173.950 | 3.811.350 | 4.251.450 | - |
| 16 | Perekam Medis | 3.173.950 | 3.811.350 | 4.251.450 | - |
| 17 | Pranata Laboratorium Kesehatan | 3.173.950 | 3.811.350 | 4.251.450 | - |
| 18 | Radiografer | 3.173.950 | 3.811.350 | 4.251.450 | - |
| 19 | Widyaiswara | 3.173.950 | 4.027.550 | 4.827.150 | 5.951.950 |
| 20 | Peneliti | 3.173.950 | 4.027.550 | 4.827.150 | 5.951.950 |
| 21 | Penyuluh Perikanan | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | 5.579.450 |
| 22 | Penyuluh Pertanian | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | 5.579.450 |
| 23 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | 3.087.550 | 3.464.350 | 4.198.950 | - |
| 24 | Pengawas Benih Tanaman | 3.173.950 | 3.526.450 | 4.320.150 | - |
| 25 | Pengawas Bibit Ternak | 3.173.950 | 3.526.450 | 4.320.150 | - |
| 26 | Pengawas Mutu Ikan | 3.173.950 | 3.526.450 | 4.320.150 | 5.393.450 |
| 27 | Medik Veteriner | 3.173.950 | 3.902.150 | 4.723.650 | 5.858.950 |
| 28 | Analisis Pasar Hasil Pertanian | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | - |
| 29 | Analisis Kepegawaian | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | - |
| 30 | Penyuluh Peternakan | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | 5.579.450 |
| 31 | Auditor Kepegawaian | 3.173.950 | 4.027.550 | 4.827.150 | - |
| 32 | Assesor SDM Aparatur | 3.173.950 | 4.027.550 | 4.827.150 | 5.951.950 |
| 33 | Auditor | 3.173.950 | 4.027.550 | 4.827.150 | 5.951.950 |
| 34 | Pengawas Urusan Pemerintah Daerah | 3.173.950 | 4.027.550 | 4.827.150 | - |
| 35 | Mediator Hubungan Industrial | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | - |
| 36 | Pengantar Kerja | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | 5.579.450 |
| 37 | Pengawas Tenaga Kerja | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | - |

| No. | Fungsional Ahli | Pertama | Muda | Madya | Utama |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 38 | Pengawas Lingkungan Hidup | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | - |
| 39 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 2.555.750 | 3.213.550 | 4.177.950 | - |
| 40 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | - |
| 41 | Penata Ruang | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | - |
| 42 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | 2.397.850 | 2.483.650 | 2.760.150 | - |
| 43 | Pustakawan | 2.412.150 | 2.431.450 | 2.736.450 | 3.221.450 |
| 44 | Penguji Mutu Barang | 2.397.850 | 2.483.650 | 2.760.150 | - |
| 45 | Penera | 2.483.650 | 2.991.050 | 3.220.950 | - |
| 46 | Sandiman | 3.025.950 | 3.480.850 | 3.715.650 | - |
| 47 | Arsiparis | 2.412.150 | 2.431.450 | 2.736.450 | 3.221.450 |
| 48 | Pranata Komputer | 2.555.750 | 3.213.550 | 4.827.150 | 5.393.450 |
| 49 | Perekayasa | 2.555.750 | 3.213.550 | 4.827.150 | 5.393.450 |
| 50 | Perencana | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | 5.579.450 |
| 51 | Pengawas Radiasi | 3.173.950 | 3.902.150 | 4.723.650 | 5.858.950 |
| 52 | Tenaga Analis Kebakaran | 3.173.950 | 3.651.850 | 4.470.150 | - |

2. Jabatan Terampil

| No. | Fungsional Terampil | Pelaksana Pemula | Pelaksana Lanjut | Mahir | Penyelia |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| 1 | Tenaga Fungsional Terampil | 2.132.050 | 2.471.350 | - | 2.810.650 |
| 2 | Tenaga Fungsional Kebakaran | 3.150.000 | 3.475.000 | 3.825.000 | 4.200.000 |

3. Jabatan Guru, Penilik Sekolah dan Pengawas Sekolah

| No. | Fungsional Terampil | Gol. II | Gol. III | Gol. IV |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Guru | 1.618.850 | 1.708.150 | 2.078.850 |
| 2 | Penilik Sekolah | | 1.991.950 | 2.243.350 |
| 3 | Pengawas Sekolah | | 2.282.350 | 2.614.050 |
| 4 | Pamong Belajar | | 1.991.950 | 2.243.350 |

C. Besar tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

| No. | Jabatan / Esselon | Jumlah (Rp) |
|-----|--|-------------|
| 1 | Sekretaris Daerah / II.a | 20.000.000 |
| 2 | Assisten Daerah / II.b | 14.000.000 |
| 3 | Kepala Badan Perencanaa, Pembangunan Daerah (BAPPEDA) / II.b | 13.000.000 |
| 4 | Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) / II.b | 13.000.000 |
| 5 | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) / II.b | 13.000.000 |
| 6 | Inspektur / II.b | 15.000.000 |
| 7 | Kepala Bagian Sekretariat Daerah / III.a | 9.000.000 |

D. Besar tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Pejabat Struktural dan Pejabat Pelaksana

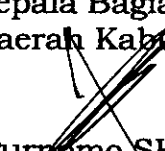
| No. | Esselon / Golongan | Jumlah (Rp) |
|-----|--------------------|-------------|
| 1 | Esselon II.b | 12.174.150 |
| 2 | Esselon III.a | 8.489.950 |
| 3 | Esselon III.b | 7.602.050 |
| 4 | Esselon IV.a | 4.677.750 |
| 5 | Esselon IV.b | 3.668.950 |
| 6 | Golongan IV | 2.309.750 |
| 7 | Golongan III | 1.871.650 |
| 8 | Golongan II | 1.553.850 |
| 9 | Golongan I | 1.451.450 |

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Purnomo, SH., MH
Nip19780605 200212 1 002